

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata merupakan praktik kejahatan yang tidak asing di negara-negara Afrika, khususnya Ethiopia. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara dan milisi Ethiopia dan Eritrea, dan milisi Amhara dalam konflik Tigray digunakan sebagai senjata perang yang pamungkas dalam merendahkan para perempuan etnis Tigray. Ambisi pemerintahan Abiy Ahmed dalam memberi hukuman kepada TPLF menjadikan eskalasi konflik Tigray semakin intensif dan melanggar hak-hak asasi manusia serta merupakan bentuk rendahnya tanggung jawab pemerintah Ethiopia terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2020-2022 dalam konflik Tigray, telah mewujudkan adanya pemikiran bahwa hal ini merupakan bentuk ketidakpatuhan Ethiopia atas Konvensi CEDAW.

Adapun perwujudan ketidakpatuhan Ethiopia atas Konvensi CEDAW dilatarbelakangi oleh konflik internal (perang saudara) yang ada di Tigray, Ethiopia. Dinamika politik Ethiopia dan lemahnya stabilitas negara memicu adanya konflik bersenjata dan semakin diperparah dengan perampasan hak-hak perempuan sebagai dampak terjadinya konflik. Keterlibatan Abiy Ahmed sebagai aktor utama yang melegitimasi kekuasaannya telah mencerminkan kapasitasnya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas terjadinya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh

perempuan. Adapun keterlibatan pihak eksternal milisi Eritrea dan Amhara menjadikan konflik Tigray semakin kompleks, atas andil mereka sebagai pelaku dalam kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah Tigray.

Selain itu, bentuk ketidakpatuhan Ethiopia dapat dilihat dari tiga indikator utama sesuai dengan teori ketidakpatuhan (*non-compliance*) yaitu ambiguitas, keterbatasan kapasitas, serta dimensi temporal. Dalam Pasal 2 Konvensi CEDAW yang mengatur mengenai tindakan legislatif, proteksi hukum dari segala bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan dapat menjadi ambigu, manakala belum terdapat spesifikasi secara khusus atas diskriminasi yang mengacu pada kekerasan seksual. Sehingga dapat menjadi alasan dibalik ketidakpatuhan Ethiopia terhadap Konvensi CEDAW. Selain itu kapasitas pemerintah Ethiopia yang buruk dalam menangani kasus kekerasan seksual kepada perempuan oleh tentara dan milisi menjadi justifikasi atas kelengahannya dalam mengatasi konflik Tigray dan mencegah pelanggaran Konvensi CEDAW.

Ethiopia pada awalnya berkomitmen untuk menegakan hak-hak perempuan terhalang akibat adanya perubahan fokus atas isu politik dalam konflik bersaudara dengan tingginya intensitas kasus kekerasan seksual yang dijadikan sebagai senjata perang dengan menjadikan perempuan sebagai korban dalam kekerasan berbasis gender oleh tentara dan milisi terhadap perempuan di Tigray. Sehingga dari berbagai pelanggaran atas Hukum Humaniter Internasional dan perampasan hak-hak perempuan dalam konflik Tigray menunjukkan ketidaksesuaian atas implementasi nilai-nilai dalam perjanjian internasional serta bentuk rendahnya kepatuhan Ethiopia atas Konvensi CEDAW.

4.2 Saran

Dengan posisi strategis di wilayah Afrika Timur, Ethiopia menghadapi isu keamanan yang mengancam perdamaian, terlebih dengan adanya pengaruh faktor eksternal dari negara Eritrea dan Sudan. Resolusi kemanusiaan atas konflik Tigray mungkin telah tercapai melalui perjanjian gencatan senjata. Namun, diperlukan akuntabilitas atas kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Tigray dengan menegakan keadilan, diantaranya dengan membawa para pelaku (pasukan bersenjata Ethiopia dan Eritrea) untuk diadili sesuai dengan ketentuan hukum baik secara domestik dan internasional. Sehingga pemerintah Ethiopia harus mendukung adanya investigasi yang kredibel, transparan, dan independen terhadap berbagai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Penulis mengharapkan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme penegakan hukum bagi para pelaku yang notabene tentara dan milisi ini dapat diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mengingat ungkapan dari Abiy Ahmed yang menyatakan akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap tentara yang terbukti bersalah dan bertanggung jawab atas kekerasan seksual di Tigray. Namun ungkapan tersebut dinilai sebagai omong kosong, apabila penegakan hukum terhadap para pelaku tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diperlukan sebagai upaya komprehensif dalam meminimalisir masalah yang lebih besar, khususnya dalam konflik bersenjata. Para pemimpin yang memicu krisis humaniter sudah sepatutnya mengambil langkah-langkah konsiliasi mereka dapat mulai membangun perdamaian demi masa depan yang lebih stabil untuk Ethiopia.